

## PENINGKATAN PERANAN SDM GENERASI Z GUNA PERTAHANAN NASIONAL MARITIM MENUJU INDONESIA MAJU

Hario Istiqlal Agung<sup>1</sup>, Yusuf Ali<sup>2</sup>, Untung Hartono<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [iqlal92@gmail.com](mailto:iqlal92@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor kunci penentu keberhasilan pelaksanaan bela Tanah Air, saat ini menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin canggih, penguasaan teknologi sangat penting, namun harus dibarengi dengan teknologi sumber daya manusia. Keterampilan adalah persyaratan kemampuan untuk mengembangkan keterampilan bertindak, memperoleh kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Generasi keempat perang saat ini memaksa setiap negara untuk mengoordinasikan semua sumber daya nasionalnya di kekuatan pertahanan. Sumber daya manusia Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan pertahanan, tetapi harus didukung oleh industri pertahanan yang tepat untuk memiliki teknologi yang tersedia persenjataan yang efektif. Profesionalisme Personil Pertahanan juga penting bagi warga sipil dalam manajemen pertahanan masa depan. Dengan menyambut Komunitas ASEAN yang akan resmi berdiri pada akhir tahun 2015, Indonesia harus memperkuat diri dengan mengembangkan kembali potensinya kelautan, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia terhadap pemerintah Presiden petahana Joko Widodo yang mengusung Indonesia menjadi Poros Maritim Global. Upaya pengembangan potensi bahari tidak hanya dipimpin oleh pemerintah, tetapi juga oleh gerakan rakyat, termasuk Pemuda Maritim Indonesia (GPMI). GPMI memiliki visi yang memicu semangat Maritim Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, GPMI memiliki tiga tujuan. pengembangan sumber daya alam sumber daya alam laut dan sumber daya manusia; Menyusun dan menyimpulkan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Salah satu pencapaian dari quest ini adalah Program Bina Lingkungan. Untuk itu, studi ini membahas peran GPMI dalam pengembangan sumber daya manusia di Pulau dilaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus, termasuk tinjauan pustaka sumber dan wawancara terkait beberapa pemangku kepentingan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa GPMI memiliki hasil positif dalam mengembangkan sumber daya manusia maritim, tetapi GPMI tidak menyertakan quest buildable lainnya Komunitas ASEAN dan Kesadaran Poros Maritim Dunia. Jadi, Studi ini merekomendasikan bahwa GPMI harus mempertimbangkan dua kategori lagi program utama dan mencerminkannya dalam program pengembangan sumber daya sumber daya manusia maritim.

**Kata Kunci:** Gerakan Pemuda Maritim, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Pertahanan Maritim

### Abstract

*Human resources (HR) are the key determining factor for the successful implementation of homeland defense, currently facing an increasing threat. Along with the development of increasingly sophisticated defense technology, mastery of technology is very important, but it must be accompanied by human resource technology. Skills are a requirement of the ability to develop the skills of action, acquire independence, and reduce dependence on a foreign country. The current fourth generation of the war forces each country to coordinate all its national resources in the defense forces. Indonesia's abundant human resources can be utilized as a defense force, but it must be supported by the right defense industry to have effective weapons available technology. The professionalism of Defense Personnel is also important for civilians in the management of future defenses. By welcoming the ASEAN Community which will be officially established at the end of 2015, Indonesia must strengthen itself by re-developing its marine potential, in line with Indonesia's foreign policy towards the government of incumbent President Joko Widodo who brought Indonesia into the Global Maritime Axis. Efforts to develop nautical potential are not only led by the government, but also by people's movements, including the Indonesian Maritime Youth (GPMI). GPMI has a vision that ignites the spirit of Maritime Indonesia. To realize this vision, GPMI has three goals. development of natural resources of marine and human resources; Drawing up and concluding cooperation*

agreements with related parties. One of the achievements of this quest is the Community Development Program. For this reason, this study discusses the role of GPMI in the development of human resources on the island reportedly. This research uses a qualitative approach, namely case studies, including a literature review of sources and interviews related to several stakeholders. In conclusion, this study shows that GPMI has positive results in developing maritime human resources, but IT does not include other buildable quests of the ASEAN Community and the World Maritime Axis Awareness. So, this study recommends that GPMI should consider two more categories of major programs and reflect them in maritime human resource development programs.

**Keywords:** Maritime Youth Movement, Human Resources, and Maritime Defense Technology



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Saat Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, investasi sangat dibutuhkan mulai sekarang, khususnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) adalah sesuatu memerintah dan menjadi kekuatan utama suatu negara dalam proses pembangunan negara atau untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Ini sejalan dengan misi ketentuan UUD 1945 tentang tujuan bangsa Indonesia, yaitu; (1) melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kapasitas pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara harus selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk mengubah sumber daya nasional sesuka hati menjadi alat yang efektif dari angkatan bersenjata. Sebuah sumber daya berupa sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjaga pertahanan negara. Kompleksitas masalah dan perkembangan pertahanan semakin beragam. Tentunya berbagai ancaman tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan atau pengembangan kebijakan pertahanan. Indonesia tidak lagi mengutamakan kekuatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, perlu mahir kapasitas teknologi dan manusia dalam manajemen pertahanan.

Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia, jelas diuntungkan karena memiliki SDM yang melimpah. Namun, jumlah SDM tidak selamanya menjamin terciptanya sistem pertahanan yang baik dan efisien, tanpa memiliki skill pertahanan dan dukungan alutsista yang mumpuni. Indonesia pun saat ini mendapatkan bonus demografi, dimana angkatan muda produktifnya kini berada dalam jumlah terbesar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut masih belum banyak. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen.<sup>3</sup> Kondisi ini merupakan peluang emas bagi Indonesia dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan membangun pertahanan.

Sebagai negara kepulauan, posisi geopolitik Indonesia sangat strategis diapit oleh dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia). Indonesia Ia juga memiliki beberapa choke point yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional di Indonesia Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia dalam proses pembangunan ekonominya, namun intensitasnya harus kita perhatikan. Ancaman baru muncul lebih tinggi lagi. Beberapa ancaman baru-baru ini permukaan, yaitu: terorisme, separatis bersenjata, ancaman kelompok ekstremis, konflik komunitas, kerusuhan sosial, pembajakan dan pembajakan, imigrasi ilegal, ilegalitas penangkapan ikan, illegal logging dan penyelundupan. Berdasarkan perkiraan kertas putih pertahanan bahwa kemungkinan ancaman asing berupa agresi militer tidak mungkin terjadi,<sup>4</sup>

akan Tapi itu tidak berarti tidak ada lagi risiko invasi. Perkembangan terkini di dunia ini menunjukkan bahwa risiko agresi militer masih ada, misalnya invasi militer ke Ukraina Rusia, ISIS, konflik Laut Cina Selatan dan lain-lain.

Dalam konteks sumber daya manusia pertahanan, jumlah personel militer yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 0,2% dari populasi negara, atau lebih dari 1.000 penduduk Ada 2 tentara. Kondisi yang kurang ideal ini tentu tidak sebanding dengan ancamannya. itu terjadi. Sumber daya manusia nasional yang melimpah tidak sebanding dengan jumlah tentara, seperti yang tidak dimiliki Indonesia selama perang. Pertahanan perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman yang muncul meningkat, apakah itu masalah serangan militer ke negara lain atau gangguan internal. Oleh karena itu, ketersediaan teknologi pertahanan mutlak diperlukan untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia yang ada.

Ketersediaan teknologi pertahanan harus didasarkan pada tiga alasan strategis, yaitu: (1) ada ancaman; (2) tidak dapat digunakan, berbahaya, rusak atau program modernisasi alutsista; dan (3) berdasarkan rencana makro dan keberlanjutan, baik dari segi pendanaan dan pelaksanaan proyek. Tapi kurangnya anggaran pertahanan membuat Indonesia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang ideal. Menggunakan sekitar ini adalah untuk membangun kekuatan pertahanan minimum (KPM) atau disebut gaya esensial minimum. Pembangunan kekuatan pertahanan diorientasikan pada konsep kemampuan bertahan tanpa Hilangkan potensi ancaman yang dihadapi dan pertimbangkan lingkungan pengembangan strategis.

Sadari Potensi Maritim Indonesia, Presiden Jokowi gagasan untuk menciptakan kembali identitas Indonesia sebagai negara maritim oleh mempromosikan Indonesia sebagai hub maritim global. Oleh Parikesit (2014), ada lima misi dalam mengimplementasikan agenda Poros Maritim Dunia. Pertama, membangun kembali budaya bahari. Kedua, Jokowi memprediksi Indonesia mengelola dan melestarikan sumber daya lautnya dengan kekuatan maritim mengutamakan keselamatan, melalui pengembangan industri perikanan, dimana nelayan merupakan tiang utama. Ketiga, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan jalan raya maritim, pelabuhan laut dalam, logistik, perkapalan industri dan wisata bahari. Keempat, pelaksanaan diplomasi maritim dengan menghilangkan potensi sumber konflik di laut. Kelima, kembangkan kekuatanmu pertahanan laut yang diperlukan untuk menjamin kedaulatan Indonesia dan sumber daya maritim.

Memaksimalkan kekuatan laut penting bagi Indonesia, Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menghadirkan banyak tantangan sekaligus peluang bagi para anggota. Berdasarkan ASEAN.org (2015), MEA bertujuan untuk membangun integrasi ekonomi regional pada tahun 2015 dengan mengubah ASEAN menjadi sebuah kawasan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal. Namun, program Poros Maritim Jokowi tidak memasukkan strategi membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Persatuan Pemuda Maritim Indonesia atau APMI (2014) mengatakan bahwa Indonesia harus mengembangkan sumber daya bangsa untuk menjadi negara maritim. Sumber Daya Konstruksi Pelaut harus memulai dengan melakukan kegiatan dengan konteks maritim dan dekat laut.

Negara maritim yang kuat akan dibangun kepribadian mudanya melalui kegiatan aktual saat berlatih di kapal dengan termasuk masyarakat sipil. Sumber daya manusia maritim didefinisikan sebagai: masyarakat memahami laut secara fisik, sosial, budaya dan Ada juga aspek ekonomi. Lokasi dekat laut akan membantu mereka di masa depan memahami pendekatan kontekstual untuk masalah negara. Strategi Mahan membahas perkembangan kekuatan maritim negara. berdasarkan Mahan in Black (2006), ada enam faktor pendukung penting tanah kekuatan laut di mana Mahan terdiri dari karakter penduduk dan sumber daya

nasional dan manusia sebagai penentu kekuatan maritim, sayangnya dilupakan oleh strategi poros maritim dunia Presiden Jokowi.

Pengembangan SDM kemaritiman sebenarnya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam hal ini Gerakan Pemuda Maritim Indonesia (GPMI). GPMI melihat Indonesia memiliki potensi maritim yang besar. Mereka menilai potensi maritim Indonesia cukup lestari dan langka dipengaruhi oleh program pembangunan pemerintah. GPMI punya program pengembangan masyarakat di pulau Tunda, Banten sebagai percontohan atau proyek memeriksa. Oleh karena itu, sesuai dengan konteks regional saat ini, menghadapi MEA 2015 tetapi juga agenda Poros Maritim Dunia, studi ini Diskusikan peran GPMI dalam pengembangan sumber daya manusia kelautan di Indonesia, khususnya di Pulau Tunda, Banten. Di akhir studi ini, Pembaca diharapkan mengetahui strategi alternatif yang dapat dibangun oleh LSM khususnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Maritim Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menurut Bryman (2004) tujuannya adalah untuk menemukan makna di balik salah suatu fenomena. Data yang dikumpulkan dari literatur. Studi literature adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber studi pustaka. Alasan kenapa memilih studi literature dikarenakan teori-teori yang mendasari penelitian ini dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan, selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi dan pemikiran-oemikiran yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pembangunan Maritim Nasional**

Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai Pernyataan Djuanda pada tahun 1957 menegaskan desain Wawasan Nusantara, yang kemudian diperkuat dalam United Nations Convention on the Law laut (UNCLOS) 1982 menempatkan Indonesia sebagai negara Pulau dengan potensi ekonomi yang besar. Dengan menyatakan Djuanda, prospek masyarakat Indonesia di sektor maritim disorot tentang penyatuan teritorial wilayah kedaulatan tanah air leluhur. Jika hanya Negara kepulauan yang diakui secara global harus digunakan untuk tujuan pengembangan dan keamanan serta dasar penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 memberikan peluang yang sangat baik untuk bagus untuk ditanggapi secara serius oleh masyarakat Indonesia kebijakan pembangunan nasional prioritas fasilitas maritim. Mengingat kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara, pulau-pulau tersebut telah menerima pengakuan dunia, maka itu adalah Tentu saja, seluruh proses pembangunan harus ditandai dan diarahkan Nusantara didukung oleh semua kekuatan maritim strategis didukung oleh kebijakan pembangunan maritim nasional untuk menjadi negara maritim. Bangsa Maritim adalah sebuah negara Kuasai semua kekuatan strategis di lautan yang didukung oleh kekuatan armada laut, baik itu armada niaga, armada perang, armada dinas industri dan kelautan dan kebijakan pembangunan negara yang berbasis laut.

Pembangunan ketahanan nasional dirancang dan dibangun berdasarkan pemikiran geostrategis Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi Negara dan konstelasi geografis Indonesia merupakan negara maritim. Sebagaimana dijelaskan di atas, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu syarat mutlak untuk mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, selama keberadaan

bangsa, secara alami terbentuk dan menerapkan beberapa bentuk strategi pertahanan nasional untuk Kehidupan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Karena Indonesia suka negara kepulauan, maka diperlukan strategi pertahanan negara kepulauan maritim untuk menjaga dan melindungi seluruh potensi maritim dan Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencegah setiap ancaman terhadap keamanan dan pertahanan Negara yang datang tak terduga.

## **Pembahasan**

### **Strategi Kemanana Pertahanan Maritim**

Menghadapi berbagai peluang ancaman keamanan Pertahanan karena posisi negara yang strategis di Indonesia Penetapan strategi pertahanan sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor. Maret 2002 tentang pertahanan yang membutuhkan pertahanan ini Negara ini dibentuk sebagai berikut sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Ini adalah negara kepulauan dan menjaga kedaulatan nasional. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep strategi pertahanan Indonesia adalah Mengandalkan berbagai bentuk ancaman dan upaya mempengaruhi Kami menyambut baik sekaligus memperkuat pencegahan dan berpegang pada prinsip pertahanan tingkat lanjut. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan musuh-musuhnya di perbatasan luar udara di atasnya.

Strategi Pertahanan Nasional Menampilkan Negara Angkatan Laut kepemimpinan Indonesia Manfaatkan ruang laut sebaik-baiknya Kesejahteraan rakyat dan perlindungan negara secara keseluruhan Konservasi Wilayah Republik Indonesia. Untuk itu perlu ditetapkan strategi pembangunan nasional. Wilayah laut mulai dari pengelolaan wilayah laut didukung oleh Strategi Angkatan Laut Pertahanan Negara Mempertimbangkan evolusi lokasi geografis dan lingkungan strategis Semua jenis ancaman yang dirasakan dapat diprediksi. Sekaligus, menjadi peluang untuk mewujudkan laut sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.

Ruang laut bagi masyarakat Indonesia memiliki dua arti. Secara strategis, yaitu sebagai media pembangunan dan sarana perlindungan. upaya Pelaksanaan penataan ruang wilayah laut untuk pertahanan Oleh karena itu, penerapannya saat ini belum maksimal. Pembangunan lingkungan strategis bagi negara Indonesia. Sebaik Itu tidak mencerminkan penggunaan dan pengelolaan ruang laut. Keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan pertahanan, meliputi: Paradigma negara maritim-sentris, tidak didukung oleh regulasi Legislasi yang memadai, kurangnya sumber daya manusia (SDM) adalah dukungan badan khusus yang menangani hal ini, serta kurangnya data/informasi tentang daerah dan potensinya Isu maritim nasional yang mempersulit perencanaan Pengembangan dan implementasi strategi pertahanan di seluruh kawasan yurisdiksi Indonesia. Jika tidak ada rencana untuk kawasan lindung Sektor maritim menciptakan kerawanan nasional, khususnya dalam hal: pertahanan Nasional. dengan masalah yang disebutkan di atas Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Perlu direfleksikan perlunya upaya penerapan pengendalian Ruang pertahanan angkatan laut, jadi strategi pertahanan Tentu saja akan membantu untuk menjaganya. Konservasi Wilayah Republik Indonesia.

Ruang di kawasan pantai sangat penting. pertahanan Nasional. Ada sisi perairan laut negara Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara. manajemen bisnis Ruang di zona pertahanan maritim mutlak diperlukan. Karena wilayah laut Indonesia jauh, kelangsungan hidup negara Indonesia lebih luas dari daratan Indonesia adalah negara kepulauan darat, laut, dasar laut, tanah di bawahnya, dan udara, termasuk merupakan satu kesatuan wilayah, termasuk semua aset di atas, dan Umumnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Ia dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memperhatikan status spasial wilayah laut Indonesia di bawah Menurut ketentuan Konvensi

Internasional tentang Hukum Laut, Indonesia adalah kedaulatan atas wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjaga dan melindungi ruang wilayah laut nasional Indonesia. Untuk itu diperlukan penataan ruang wilayah laut. Diharapkan dapat diperoleh rencana tata ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah laut. Badan Sinergi dan Kesatuan Pertahanan Nasional di Laut Potensi laut lainnya harus dikelola dengan baik. kondisi manajemen Karena perencanaan wilayah zona pertahanan laut belum dilaksanakan, Ia gagal mendukung strategi pertahanan, khususnya strategi pertahanan. negara laut. Situasi ini tentu dapat merusak ketahanan negara. Hal ini dapat mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Indonesia tentang laut berkaitan dengan penggunaan untuk kepentingan masyarakat Keamanan nasional masih rendah. peran perlindungan Gagal menguasai wilayah laut nasional Indonesia Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kerja yang tersedia. Investigasi dan minat dalam industri maritim Beberapa pemimpin/penguasa tertarik dengan urusan maritim. Kurangnya dukungan dan level tenaga kerja Obsesi pemimpin dengan masalah maritim ini Dinyatakan oleh ketidakpedulian pemangku kepentingan Pemangku kepentingan di sektor maritime.

Orang asing yang berkeliaran menelepon ke rumah tanah air atau Tanah air, dalam terjemahan lebih akurat dalam bahasa Indonesia ditafsirkan oleh ibu pertiwi atau tanah air. Periode ini mungkin Berasal dari Pemujaan Dewi kesuburan universal. Meskipun nenek moyang bangsa Indonesia mengenal ibadah Kepada dewi kesuburan, hubungi negaramu Lebih tepatnya, istilah "Bumi" Ingat airnya", orang Indonesia kelompok etnis yang berbeda menempati pulau Itu dikelilingi oleh laut yang sangat besar.

Buku Putih Pertahanan jelaskan perlindungan ini Indonesia adalah sistem perlindungan universal untuk mencapai tujuan nasional. pertahanan negara, yaitu Alam semesta ini pada dasarnya adalah bentuk perlindungan Partisipasi semua warga sesuai fungsi dan perannya setiap. (Departemen Pertahanan, 2015). sistem perlindungan ruang sendiri digabungkan pertahanan dan pertahanan militer non-militer melalui upaya konstruksi Garda Nasional Kuat dan hormat. ini penting disiapkan terlebih dahulu dengan semoga bisa berhasil Itu dapat menangani jenis ancaman.

Oleh karena itu, masyarakat maritim pasti berperan upaya pertahanan. konsep masyarakat laut referensi aktual unit sosial sepenuhnya atau sebagian besar tergantung pada kehidupan publik ekonomi secara langsung atau tidak digunakan secara langsung Sumber daya dan layanan kelautan Laut. Ini diatur ke dalam unit kelompok kerja berikut: komunitas nelayan dan pelayaran, Angkatan Laut dan Gugus Tugas keamanan laut, penambang, pedagang dan pengusaha industri Makanan laut dan kawasan industri turis. mereka memiliki fungsi semua orang yang memulai urutan penggunaan sumber daya resolusi, keamanan, keamanan serta di bidang perbaikan turis. (Maynar, S., 2017).

Selama beberapa dekade terakhir bukan hanya grup dipertimbangkan dalam masyarakat ahli waris dan pelindung budaya bahari indonesia, Tapi tidak semua orang adalah pengecualian. Masyarakat pesisir dan pulau Dari segala arah sampai Merauke siapa yang memulai? mengembangkan lapangan ekonomi sumber daya dan jasa maritim sekitarnya. tapi dari sudut pandang sisi properti, wilayah pesisir laut dan sumber dayanya Sering disertakan. Ia memiliki karakter terbuka. dengan akses terbuka Oleh karena itu, kepemilikan tidak diatur, Siapa pun dapat menggunakan jadi dalam perkembangan Area dan penggunaan sumber daya sering Penyalahgunaan Benturan Kepentingan ruang, sumber daya, dan peluang kerusakan lingkungan dan Masalah besar faktor eksternal karena pengaturan terbatas pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, dalam rangka mengurangi gesekan-gesekan yang ada, penting untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat maritim dalam kehidupan dan aktifitasnya sehari-hari. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya pembangunan dan pelestarian sumber daya di perairan, khususnya eksistensi pulau-pulau terdepan yang dihuni masyarakat maritim. Pengembangan kawasan terdepan sangat terbantu oleh sikap masyarakat maritim yang hidup di wilayah perbatasan dengan negara lain guna menjaga kutuhan wilayah NKRI. Dengan adanya optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat maritim, maka dukungan pertahanan dan keamanan negara dapat terjamin yang ditandai dengan aktivitas oleh masyarakat maritim Indonesia sebagai wujud dari pertahanan semesta.

Spektrum pertahanan negara sangat Luas, itu dimulai dengan hubungan Selamat tinggal, warga negara yang baik. bersama-sama untuk menghindari ancaman Musuh bersenjata yang nyata. lapisan bertindak di dalamnya lakukan yang terbaik untuk negara dan negara. Proses di Indonesia pertahanan negara diselenggarakan secara resmi oleh undang-undang. beberapa di antaranya sudah dimasukkan ke dalam panchasila Selain UUD 1945, Khususnya pada pasal 30. Dalam pasal tersebut Deskripsi di atas melindungi negara wajib Semua orang Indonesia tanpa pengecualian. Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, hal ini menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, termasuk didalamnya unsur penting bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara (Gantina, C., 2017).

Laut sendiri merupakan ajang dalam pencarian kehidupan bagi masyarakat maritim. Pada mulanya masyarakat bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, namun pada akhirnya mereka juga bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman dalam rangka mencapai tujuan nasional. Laut menjadi media pemersatu bangsa karena melalui laut banyak orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi dengan bermacam-macam aktivitas. Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui "jasa" pelayaran antar benua atau antar pulau. Tentu saja pertanyaan terkait Dengan perkembangan dunia laut Dia layak mendapatkan otoritas.

Dalam masyarakat maritim Bahkan di Indonesia Dengan pertumbuhan di berbagai sektor Subsektor ekonomi maritim Hal-hal baru yang menciptakan segmen atau kategori sosial seperti penambang, pekerja, dll. Industri, eksekutif, karyawan Pariwisata, Angkatan Laut, sarjana/peneliti, Birokrat dll. tumbuh besar Pembangunan sektor ekonomi Dan layanan menurut segmen Komunitas maritim Butuh, lalu Pembangunan dan perubahan kelembagaan Ini akan menjadi forum dan regulasi. Bentuk pemberdayaan yang sebenarnya Yang lain disetujui Perahu nelayan baik-baik saja Perkembangan bisnisnya Dukungan teknologi Memancing di laut yang bagus Disertai dengan pengembangan sumber daya manusia Komunitas maritim itu sendiri Pasti ada efek positifnya Kepada masyarakat bahari Jelajahi sumber daya laut Ada dan mengurangi risiko Nelayan dan konflik tingkat Ekonomi lemah. Persetujuan Berarti menciptakan dirinya sendiri Peluang bagi komunitas bahari Nilai kebutuhan mereka Perencanaan dan pelaksanaan Aktivitas terakhir Ciptakan kemerdekaan yang langgeng Dalam kehidupan masyarakat ini Dirinya sendiri (Jamil, M., 2015). Itu hati Pertahanan terintegrasi Dalam bentuk persetujuan Semua komunitas maritim Lapisan masyarakat menjamin Keutuhan negara dan negara Indonesia untuk perlindungan Dengan berdirinya Republik Indonesia Indonesia di kancah internasional.

Modernisasi yang cepat dari peralatan pertahanan global dan perubahan perang generasi yang dipaksakan Indonesia beradaptasi dan mengejar ketinggalan. Kemajuan dalam peralatan

pertahanan Selain itu, erat kaitannya dengan keterampilan sumber daya manusia nasional Dukungan industri pertahanan yang kuat. Teknologi dan SDM adalah dua variabel utama Hal ini menentukan keberhasilan pengelolaan pertahanan negara. Perkembangan perang generasi ke-4 saat ini adalah konsep baru: Hal ini didasarkan pada jaringan, lintas batas, basis informasi. perang ini Menggunakan semua jaringan politik, ekonomi, sosial dan militer yang tersedia Langsung menyerang kehendak pemimpin politik musuh. Ide dasar dari perang ini adalah bahwa kemauan politik yang lebih kuat dapat diatasi. Kekuatan ekonomi dan militer yang lebih besar, karena karakteristiknya bersifat politis Ini panjang dan jaringan.

Teknologi yang digunakan juga merupakan distorsi antar teknologi Tentara dan warga sipil, sebagai personel yang dikerahkan tidak lagi sepenuhnya tentara. Mengingat Perang GW ke-4 ini, dukungan pertahanan yang kuat sangat dibutuhkan. Aktor yang terlibat adalah non-pemerintah dan Medan perang bisa dimana saja. Dengan kondisi ini, drafnya akan terlihat seperti ini: Sangat diperlukan untuk mempersiapkan perang di masa damai (Ad Bellum Pace Parati). dari Mengatur perlunya meratifikasi Undang-Undang Keamanan Nasional, yang mengusulkan pentingnya dinas militer Meningkatkan dan mengkhususkan personel perlindungan sipil. Kemungkinan sumber daya manusia warga negara Indonesia Tentu saja ini sangat melimpah sehingga akan bermanfaat untuk dapat menyesuaikan sistem pertahanan universal (Sishanta).

Letak Indonesia berada di titik silang, yaitu antara Benua Asia dan Benua Australia, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, ini yang menyebabkan Indonesia disebut memiliki posisi yang strategi baik dari aspek ekonomi dan pertahanan. Fakta geografis ini otomatis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas laut dan udara internasional.

Dengan kondisi tersebut sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, laut sangatlah penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (lebenstarum) dan sebagai ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau yang terbesar dalam bingkai satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta tergabung dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Melihat begitu strategisnya posisi Indonesia serta banyaknya potensi yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan diberbagai sektor yang berhubungan dengan sendi kehidupan sudah seyogyanya pemuda mengambil peran penting dalam kebijakan pembangunan disektor kemaritiman" Diperlukan tekad dan semangat serta visi dan misi yang kuat dari para pemuda supaya dapat berperan aktif dan menjadi garda terdepan dalam pembangunan di sektor kemaritiman, hal ini bisa dilakukan dengan memposisikan pemuda sebagai subjek dalam pembangunan dan pengembangan potensi kemaritiman.

Harus juga menjadi perhatian dan kebijakan strategis dalam perencanaan pembangunan sektor kemaritiman, akan sangat tidak ada artinya apabila masyarakat pesisir masih jauh dari kata sejahtera akibat dampak dari kebijakan yang diambil, perlu pola yang baik dan terukur dalam pemerataan peningkatan taraf kehidupan masyarakat pesisir, karena daerah kepulauan yang luas serta terpisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Untuk itu perlu adanya pendampingan dan pelopor pemuda "Cintailah Laut", ini berguna sebagai pengawasan dan implementasi dari kebijakan peraturan perundang-undangan bidang kemaritiman, melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan upaya pelestarian budaya kemaritiman terkait kearifan lokal serta meningkatkan kemampuan literasi dibidang kemaritiman bagi masyarakat pesisir.

Program tersebut haruslah didukung dengan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder dan perlu peningkatan kemampuan serta keterampilan literasi pemuda dalam

bidang kemaritiman untuk membantu pemuda supaya dapat berkompetisi di era modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat setiap harinya.

## KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, semangat menggaungkan dan kesadaran bahwa Indonesia adalah Bangsa Maritim juga perlu untuk terus diimplementasikan dalam kebijakankebijakan pemerintah dan kegiatankegiatan nyata seluruh warga negara. Cukup disayangkan jika pada level pelaksanaan di lapangan dan pada tataran masyarakat kebanyakan, masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai bangsa maritim. Dukungan konsep bela negara dapat diartikan secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara khususnya dalam mewujudkan “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.

Guna terwujudnya pertahanan semesta, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, layaknya pertahanan semesta, masyarakat maritim juga harus direalisasikan pada diri seluruh masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim yang mendunia.

Kaum milenial juga harus ikut berperan dalam menjaga kedaulatan maritim dan ikut mengembalikan kejayaan kemaritiman Indonesia menjadi penguasa dan disegani di dunia. Di mana sewaktu Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Terlebih akhir- akhir ini semangat untuk mengembalikan kejayaan dunia maritim tumbuh kembali. Sesuai komitmen Pemerintah selama ini untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2035: Indonesia Population Projection. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Black. (2006) The Legacy of Mahan for the 21st Century. USAWC Strategy Research Project.
- Bryman. (2008) Social Research Method, 2 nd Ed. New York: Oxford University Press.
- Departemen Pertahanan RI. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- FAO. (2014) The State of World Fisheries and Aquaculture: Opportunities and Challenges. Rome
- Gerakan Pemuda Maritim Indonesia. (2014) Tahap Pendahuluan: Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Sarana Prasarana Pulau Kecil Terdepan di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Riset GPMI.
- Huntington, Samuel. 2003. Prajurit Dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil. Edisi Terjemahan. Jakarta: Grasindo.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 2006. “Buku Putih: Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan”. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- Lampiran Peraturan Presiden No. 7 tahun 2008.
- N. Krisnan. (2014) Manusia Bahari yang Berkarakter Menuju Indonesia Negara Maritim. Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia. [Online] November.

- <http://www.pemudamaritim.com/2014/11/manusia-bahari-yang-berkaraktermenuju.html>.
- NGO Handbook. (2015) What is a Non-Governmental Organization. [Online] Available from: <http://www.ngohandbook.org/index.php?title=What is a NonGovernmental Organization %28NGO%29%3F>.
- Nugroho, Wibawanto. 2005. "Menyongsong Keamanan Nasional 2025: Inovasi, Transformasi dan Strategi Sumber Daya Nasional". Jurnal Angkatan Darat Yudhagama. Edisi Maret 2005.
- Parikesit. (2014) Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim. Tempo. [Online] 13th November. Available from: <Http://Dunia.Tempo.Co/Read/News/2014/11/13/118621707/Cara-JokowiJadikan-Indonesia-Poros-Maritim>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- R. Ambarwati. (2014) Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan sebagai Negara Maritim. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. [Online] 8th October. Available from: <http://www.ppkkp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untukmengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>.
- Subekti. 2012. "Modernisasi Alutsista TNI AD Untuk Mencapai Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum". Jurnal Angkatan Darat YudhagamaVol.32. No.1. Maret 2012.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 2005. Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syaugi, M (Marsda TNI). "Pengembangan Teknologi Menuju Kemandirian Industri Pertahanan". Majalah Wira. Media Informasi Kementerian Pertahanan Edisi Khusus 2014.
- The SAGE Dictionary of Social Research Methods. Purposive Sampling. . [Online] Available from:<http://srmo.sagepub.com/view/the-sage-dictionaryof-social-research-methods/n162.xml>.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2012, tentang industri pertahanan.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Valenzuela and P. Shrivastava. (2015) Interview as a Method for Qualitative Research. William. (2015) The Role of NGO. [Online] Available from: <http://www.gdrc.org/ngo/ngo-roles.html>.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2010. "Pencapaian Pembangunan Pertahanan Keamanan Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka". Jurnal Negarawan. Kementerian Sekretariat Negara.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.